

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 DINAS KESEHATAN LOMBOK BARAT

Dita Fitriani^{1*}, Rahmad Hidayat²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

*Korespondensi : ditafrn121@gmail.com

ABSTRAK

Public Safety Center (PSC) 119 merupakan sebuah inovasi dalam sektor kesehatan untuk memberikan sebuah pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan inovasi pelayanan Public Safety Center (PSC) 119 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat serta untuk mengetahui faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data berasal dari data primer dan data skunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan PSC 119 Lombok Barat Emergency Medical Service kurang berjalan secara optimal, hal tersebut di sebabkan oleh faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dan tenaga kerja yang jauh dari standar kebutuhan PSC 119. Hasil tersebut di ketahui berdasarkan analisis dari model implementasi kebijakan yang terdiri dari empat aspek yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci : Kegawatdaruratan, Psc, Kesehatan, Pelayanan.

ABSTRACT

Public Safety Center (PSC) 119 is an innovation in the health sector to provide good service to the community. The aim of this research is to determine the implementation of the Public Safety Center (PSC) 119 service innovation policy at the West Lombok District Health Service and to determine the inhibiting factors in implementing this policy. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The technique for determining informants uses purposive sampling technique. Data sources come from primary data and secondary data. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the implementation of the PSC 119 West Lombok Emergency Medical Service policy is not running optimally, this is caused by inadequate facilities and infrastructure and workforce that is far from the standard requirements of PSC 119. These results are known based on analysis. from the policy implementation model which consists of four aspects, namely, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords : Emergency, Psc, Health, Services.

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, dimana sektor kesehatan harus mengikuti perkembangan zaman termasuk mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat (Anggraeny, 2013). Pelayanan berkualitas yang dimaksud adalah pelayanan yang memenuhi kriteria baik dan berdasarkan standar medis terbaru, termasuk juga pelayanan optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Machmud, 2008). Dalam pelayanan itu sendiri membutuhkan fasilitas yang memadai dan akses pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat (Anggraeny, 2013).

Pelayanan dalam bidang kesehatan sangat diperlukan sebuah inovasi untuk mengupayakan pelayanan sosial bagi masyarakat. Sehingga pelayanan kesehatan dan kegawatdaruratan harus mampu berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan yang ada serta mampu merespon perubahan dengan cepat sehingga dapat menghadirkan terobosan baru dalam sektor publik pada bidang kesehatan (Yanuar, 2019).

Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2018) menegaskan, dalam melakukan sebuah pelayanan kesehatan, adapun kewajiban Rumah Sakit yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 yakni memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit (Alim et al., 2019). Berdasarkan peraturan tersebut inovasi dalam pelayanan kesehatan akan sangat membantu dalam memberikan sebuah pelayanan yang baik untuk masyarakat. Dalam (Yuliana et al.,

2020) menyebutkan, salah satu terobosan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah pengenalan program Public Safety Center (PSC) 119, yaitu layanan tanggap darurat. Program ini diluncurkan pada tahun 2016 dan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mendukung pengelolaan orang yang terlibat dalam kecelakaan dan situasi kritis sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembentukan sistem penanggulangan gawatdarurat terpadu.

Kegawatdaruratan cenderung terjadi secara cepat, tiba-tiba, dan sulit untuk diprediksi kapan terjadinya. Sebagian orang tidak sadar bahwa banyak kejadian gawatdarurat yang tidak ditangani dengan baik oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, diperlukan penguatan kualitas layanan gawatdarurat melalui proses preventif (Sylvana, 2020). Adanya inovasi PSC 119 dalam pelayanan kesehatan sehingga masyarakat dapat menghubungi call center 119 untuk pelayanan kegawatdaruratan tersebut.

Penelitian ini didukung oleh (Yuliana et al., 2020) dimana dalam penelitiannya menyebutkan, PSC 119 memberikan kemudahan dalam akses pelayanan kesehatan dan dapat langsung menghubungi nomor 119 tanpa biaya sehingga lebih membantu Masyarakat dalam menyampaikan setiap keluhannya. Sedangkan penelitian (Sylvana, 2020) menyebutkan bahwa pelayanan PSC 119 wajib dibentuk di setiap Kabupaten atau Kota agar dapat menjamin hak masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

Kebijakan pemerintah daerah tentang Public Safety Center (PSC) 119 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tertuang

dalam Peraturan Bupati No. 17A tahun 2019 tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Lombok Barat Emergency Service (PSC 119). Berdasarkan peraturan tersebut, PSC 119 ditempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dan lokasi lain yang ditetapkan pemerintah daerah yang memiliki akses dan sarana pelayanan kesehatan seperti RSUD Patuh Patuh Pudji dimana RSUD tersebut memiliki akses pelayanan kegawatdaruratan di Lombok Barat. Namun, PSC 119 tidak ditempatkan di RSUD Patuh Patuh Pudji dikarenakan tingkat RSUD belum memenuhi, sedangkan PSC 119 harus di tempatkan di Rumah Sakit yang sudah Tingkat A.

Kebijakan pemerintah tentang PSC 119 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat atau lebih dikenal dengan PSC 119 LBEMS, kebijakan ini sudah berjalan selama 4 tahun dan perlu dilakukan peninjauan terkait implementasi kebijakan tersebut. Terdapat penelitian dari (Rheni Prihanti, Bagoes Widjanarko, 2022) bahwa yang mendukung sebuah implementasi Public Safety Center (PSC) yaitu adanya kebijakan dari pemerintah daerah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, pedoman pelaksana, peran lintas dan peran Masyarakat sangat diperlukan dalam keberhasilan sebuah implementasi sehingga, dari beberapa hal tersebut dapat diketahui faktor penghambat implementasi kebijakan PSC 119 LBEMS. Model teori implementasi Edward III akan digunakan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan PSC 119 LBEMS dan faktor penghambatnya, yang dimana memuat empat aspek yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sesuai dalam penelitian (Akib, 2010) dirumuskan bahwa terdapat empat

faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang di gunakan berupa metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang akan di peroleh berasal dari data primer dan data skunder. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu antara lain observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap pelayanan kesehatan PSC 119 LBEMS. Teknik penentuan narasumber di lakukan dengan teknik purposive sampling sehingga wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa narasumber yang dimana berasal dari unit khusus PSC 119 LBEMS yang meliputi Kepala Bagian PSC 119 LBEMS atau penanggung jawab pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Unit Call Center PSC 119 LBEMS, dan Unit Respon PSC 119 LBEMS. Sedangkan dokumentasi yang dimaksud disini berupa pengambilan gambar untuk memperkuat data data yang di peroleh.

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi. Reduksi data yang di maksud yaitu dengan melakukan rangkuman, memilih atau memilah hal hal pokok dan memfokuskan pada hal yang penting saja. Sedangkan penyajian data yang di maksud adalah dengan menyajiakan sebuah teks naratif yang mudah di pahami pembaca. Sementara itu, simpulan atau verifikasi yaitu menyimpulkan hasil data yang di peroleh dari reduksi data dan penyajian

data (Urohmah Shifa, 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Public Safety Center (PSC) 119 merupakan sebuah terobosan baru di Indonesia yang di keluarkan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Sama halnya dengan pelayanan kesehatan di Victoria yaitu Virtual Emergency Department (VED) juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kedaruratan (Pu et al., 2023). Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat terkait pelayanan gawat darurat yang tertuang dalam peraturan Bupati No. 17A tahun 2019 tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Lombok Barat Emergency Service (PSC 119). Kebijakan ini di kenal lebih di kenal dengan PSC 119 LBEMS. Implementasi kebijakan tersebut akan di analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, yang dimana terdiri dari empat aspek yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan praktik di lapangan jika di lihat dari keempat aspek tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

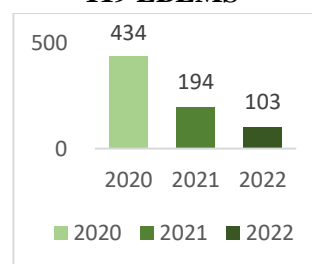
Komunikasi

Masyarakat merupakan pengguna layanan PSC 119, baik sebagai korban kegawatdaruratan maupun sebagai orang terdekat dengan korban kegawatdaruratan yang merespon untuk memanggil PSC 119. Dalam pasal 9 Permenkes No 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa peran masyarakat dalam sistem penanggulangan gawat darurat adalah memiliki pengetahuan tentang PSC 119 di daerahnya dan cara meminta bantuan melalui call center 119 jika terjadi kasus gawat darurat yang menimpa diri sendiri maupun orang disekitarnya.

PSC 119 bergerak dalam bidang kegawatdaruratan. Namun, jika dibandingkan dari segi program, PSC 119 LBEMS dengan PSC 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS) sangatlah jauh berbeda. PSC 119 MEMS memiliki program pelayanan gawat darurat, home care, home visit, jemputan poli, dan pengantaran pasien pulang (Hidayat & Ferbiyanti, 2023). Sedangkan PSC 119 LBEMS hanya memiliki pelayanan kegawatdaruratan saja dan belum memiliki program pelayanan lainnya. PSC 119 LBEMS memiliki kesamaan dengan tim darurat medis atau di kenal dengan Medical Emergency Teams (METs) di Finlandia yang hanya merepon kejadian gawat darurat saja (Myrskykari et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Kesehatan Lombok Barat memperoleh data pengguna layanan PSC 119 LBEMS sebagai berikut:

Diagram 4.1 Pengguna Layanan PSC 119 LBEMS



(Sumber: Dinas Kesehatan Lombok Barat: 2023)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengguna layanan PSC 119 LBEMS mengalami penurunan drastis selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 pengguna layanan PSC 119 LBEMS sangat banyak digunakan oleh Masyarakat Lombok Barat yaitu sebanyak 434 pengguna karena pada masa itu di

sebabkan oleh adanya wabah covid 19. Pada tahun 2021 jumlah pengguna layanan PSC 119 LBEMS mengalami penurunan drastis sebanyak 194 pengguna, hal demikian dikarenakan Indonesia telah memasuki fase new normal sehingga jumlah pengguna layanan mulai mengalami penurunan. Untuk tahun 2022 juga cukup mengalami penurunan dengan jumlah pengguna sebanyak 103 pengguna.

Terkait penurunan tersebut juga di berikan penjelasan oleh staf PSC 119 LBEMS, yaitu:

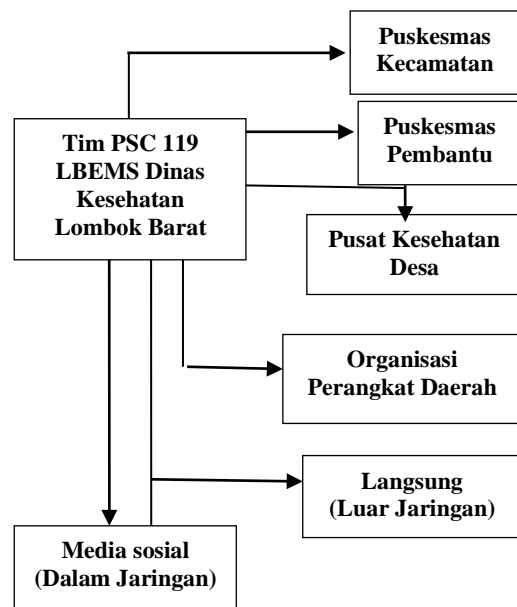
“Penurunan itu di sebabkan karena angka kecelakaan di Gerung ini sangat jarang Mba, selain itu juga kalau ada kecelakaan yang jaraknya jauh dari Dikes ya nanti kita akan hubungi puskesmas terdekat, dan itu nantinya jadi pasien puskesmas itu bukan pasien atau pungguna PSC yang di Dikes” (14/11/23).

Sesuai penjelasan staf PSC 119 LBEMS bahwa layanan PSC 119 LBEMS ini menurun di karenakan angka kecelakaan di Gerung atau sekitar Lombok Barat dari tahun ke tahun cukup minim. Selain itu, penurunan juga di sebabkan karena kecelakaan yang terjadi di suatu tempat dengan jarak dari Dinas Kesehatan cukup jauh, hal tersebut di lihat dari daerah Kabupaten Lombok Barat dengan luas 923,06 Km² sehingga tim PSC 119 LBEMS berkoordinasi dengan Puskesmas Terdekat dengan lokasi kejadian kecelakaan, hal demikian itu membuat pasien yang mengalami kecelakaan tidak tercatat sebagai pengguna layanan PSC 119 LBEMS Dinas Kesehatan. Namun akan menjadi pasien pengguna layanan di Puskesmas terdekat.

Program PSC 119 LBEMS mulai berjalan pada tahun 2019. Pemerintah

Kabupaten Lombok Barat juga melakukan sebuah sosialisasi di berbagai puskesmas dan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut sesuai dengan began komunikasi PSC 119 LBEMS sebagai berikut.

Bagan 4.2 Komunikasi PSC 119 LBEMS



(Sumber: Dinas Kesehatan Lombok Barat:2023)

Pengenalan lebih dalam kepada Masyarakat Lombok Barat bertujuan untuk mengetahui pentingnya kehadiran PSC 119 LBEMS dalam lingkungan masyarakat. Teknik pengenalan efektif yang di lakukan yaitu dengan teknik sosialisasi atau seminar terkait PSC 119.

Sesuai dengan peraturan Bupati Lombok Barat No. 17A tahun 2019 terkait dengan pembentukan PSC 119 yang dimana tim PSC 119 LBEMS melakukan pengenalan dengan model jejaring berfokus di Puskesmas sekitar Kabupaten Lombok Barat dan tentunya berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat daerah (OPD) lainnya. Selain itu pengenalan juga

di lakukan secara daring melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok, dan Youtube sebagai bentuk kampanye dari PSC 119 LBEMS agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Karena seperti yang kita tahu bahwa pergerakan media sosial itu sangat cepat dan bersifat global. Sejalan dengan yang di paparkan oleh salah seorang staff PSC 119 LBEMS, yaitu:

“Tim PSC pernah melakukan sosialisasi, Sosialisasinya itu modelnya jejaring, jadi kita fokuskan di puskesmas sekitar Lombok barat sama kita juga pernah adakan pertemuan dengan ambulan desa untuk promosinya dan kita juga komunikasi dengan OPD OPD yang ada di Lombok barat trus promosinya juga ada melalui media sosial trus kita juga pertemuan, sama ambulan desanya kita undang, sama yang dari puskesmas juga sosialisasi ke pasiennya,“ (14/11/23).

Gambar 4.3 Sosialisasi PSC 119 LBEMS



**Pengenalan PSC 119 Lombok Barat
Emergency Medical Service**

50 x ditonton 2 thn lalu #psc119 ...selengkapnya

(Sumber: Media sosial PSC 119 LBEMS: 2023)

Sumber Daya

Tenaga kerja PSC 119 LBEMS Dinas Kesehatan untuk 3 tahun belakang ini hingga sekarang berjumlah 10 tenaga kerja, dan itu termasuk perawat, serta koordinator, call center, dan operator PSC 119 LBEMS. Sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh, yaitu:

| No | Anggota PSC 119 | Jumlah |
|--------------|-----------------|-----------|
| 1 | Koordinator | 1 |
| 2 | Perawat | 8 |
| 3 | Supir | 1 |
| Total | | 10 |

(Sumber: Dinas Kesehatan Lombok Barat:2023)

Dan dengan keadaan saat ini seluruh lini yang dibutuhkan pada PSC 119 belum terpenuhi dengan baik, sedangkan PSC 119 idealnya membutuhkan 26 tenaga kerja. Berdasarkan penelitian dari (Rosita et al., 2022) menegaskan bahwa tenaga kerja memegang kunci utama dalam memberikan pelayanan dan menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Dalam (Lev et al., 2023) juga menekankan pentingnya melibatkan petugas kesehatan dalam hal pengambilan Keputusan terlebih dalam memberikan sebuah pelayanan. Seperti yang kita ketahui bahwa, PSC 119 ini merupakan

suatu bentuk pelayanan gawatdarurat yang dimana dibutuhkan tenaga kerja yang cepat tanggap atau respon yang cepat terhadap pasien.

Dokter dan perawat yang bergelut dalam bagian kegawatdaruratan, dituntut untuk selalu cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kesehatan secara profesional. (Hutapea & Huwae, 2023). Maka dari itu, PSC 119 LBEMS telah disiapkan sebuah pelatihan bagi setiap tenaga kerja. Adapun pelatihan yang diperoleh yaitu pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS), serta pelatihan lainnya yang berhubungan dengan gawat darurat. Begitupula yang di paparkan oleh salah seorang staf PSC 119 LBEMS, yaitu:

“Iya di berikan pelatihan, selain basic yaa, kita juga pernah mengadakan pelatihan gawat darurat kemarin, karena kita gelutnya di gawat darurat ya pelatihannya gawat darurat (BTCLS), Yang memberikan pelatihan kemarin dari Provinsi selain itu ada juga dari Dinas Kesehatan yang memberikan pelatihan untuk tim PSC,” (14/11/23).

Dari pelatihan yang di peroleh itu akan menghadirkan tenaga kerja yang berkualitas dan cepat tanggap terhadap setiap keluhan Masyarakat.

Dalam penelitian (Verma et al., 2023) di tekankan bahwa pelayanan medis darurat yang efektif sangat penting dan berperan dalam mengurangi angka kesakitan dan kematian terhadap korban kecelakaan. Tenaga kerja yang berkualitas juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai pula. Berdasarkan hasil penelitian yang di

lakukan di Dinas Kesehatan lombok Barat menunjukkan fasilitas fasilitas yang di gunakan oleh tim PSC 119 LBEMS.

| No | Nama Fasilitas | Total | Ket |
|----|-------------------|-------|--------------|
| 1 | Mobil Ambulan | 1 | Layak |
| 2 | Telepon | 4 | Cukup Layak |
| 3 | HP | 1 | Kurang Layak |
| 4 | Komputer | 4 | Layak |
| 5 | Oksigen | 2 | Layak |
| 6 | Kotak P3K | 3 | Layak |
| 7 | Tas Emergency Kit | 1 | Layak |
| 8 | EKG | 1 | Layak |
| 9 | Strecher | 1 | Layak |
| 10 | Monitor | 1 | Layak |
| 11 | HT | 10 | Layak |

(Sumber: Dinas Kesehatan Lombok Barat:2023)

Hasil penelitian menunjukkan bahwaadanya fasilitas yang cukup layak seperti mobil ambulan,telepon, computer, oksigen, kotak P3K, tas emergency kit, EKG, stretcher, monitor, dan HT. namun terdapat satu fasilitas yang kurang layak yaitu HP. Fasilitas tersebut Sebagian besar layak untuk digunakan karena program PSC 119 LBEMS masih belum lama berjalan. Adapun anggaran PSC 119 LBEMS yang di dapatkan setiap tahun yaitu, lebih dari Rp. 300.000.000. dalam setiap kegiatan tim PSC 119 LBEMS mendapatkan honor sebesar Rp. 100.000 untuk di bagi rata setiap tim yang bertugas. Selain itu, terdapat pula uang bensin ambulan sebesar Rp. 200.000- Rp. 300.000. Karena pada dasarnya anggaran

merupakan instrumen pendukung dalam sebuah kegiatan untuk menjalankan program dari sebuah Lembaga.

Disposisi

Tuntutan pekerjaan yang lebih professional harus memiliki komitmen tenaga kerja yang tinggi juga (Cahyani & Prianthara, 2022). Karena pada dasarnya komitmen dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya seorang individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu keselamatan tenaga kerja sangat penting untuk di perhatikan dalam mewujudkan kinerja tenaga kerja yang maksimal, sehingga PSC 119 LBEMS menyediakan BPJS tenaga kerja sebagai bentuk perlindungan sosial bagi setiap tenaga kerja PSC 119 LBEMS.

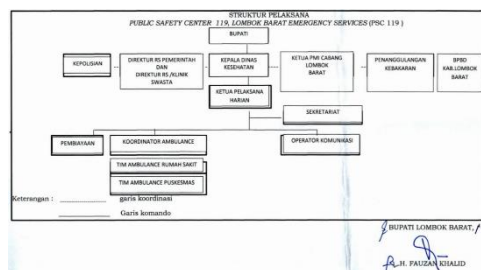
Pengembangan sebuah strategi sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan kemampuan, teoritis, teknis, konseptual dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan suatu organisasi (Pramestyani1 et al., 2023). Maka dari itu, PSC 119 LBEMS tentu harus dapat mengembangkan strategi dalam meningkatkan komitmen profesionalitas tenaga kerja terlebih dalam merespon perubahan pada zaman ini. Hal tersebut tidak luput dari dukungan pemerintah, yang dimana dipaparkan oleh (Onjewu et al., 2023) bahwa dukungan pemerintah sangatlah penting demi keberlangsungan sebuah Perusahaan atau institusi. Hal demikian juga di paparkan oleh (Revangga Putra & Wardani, 2023) dimana perubahan yang terjadi sangat bergantung pada pemimpin. Kepemimpinan menggunakan perubahan untuk membuat kemajuan. Kepemimpinan mengandung semua yang diperlukan untuk merangsang perubahan yang konstruktif. Respon pemimpin yang baik akan menentukan sebuah organisasi

kedepannya. Mengkomunikasikan setiap informasi dari mekanisme sebuah perubahan yang terjadi sangat penting dalam proses perubahan (Liana et al., 2021). Maka dari itu, seorang pemimpin di sebuah institusi atau organisasi haruslah memiliki keterampilan, kecerdasan emosional, ketegasan dan sebagainya untuk mengondisikan anggotanya agar dapat menyelaraskan rencana program yang harus dilaksanakan oleh sebuah organisasi

Struktur Birokrasi

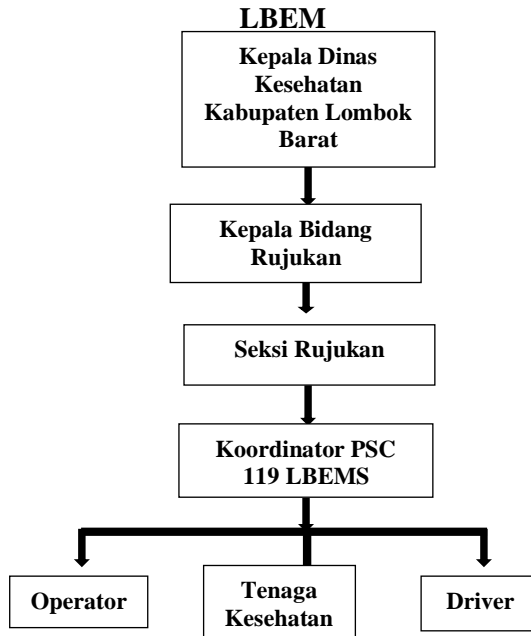
Kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok Barat tentang PSC 119 LBEMS di bentuk sehubungan dengan amanat peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga Bupati Lombok Barat mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam peraturan Bupati nomor 17A tahun 2019 tentang Pembentukan Public Safety Center Lombok barat Emergency Medical Service (PSC 119). Sehubungan dengan peraturan tersebut adanya tim khusus dari PSC 119 LBEMS yang di tempatkan di Dinas kesehatan Kabupaten Lombok Barat sesuai yang tertuang dalam naskah kebijakan tersebut.

Gambar 4.4 Struktur Pelaksana PSC 119 LBEMS



(Sumber: Peraturan Bupati Lombok barat No. 17A Tahun 2019)

Bagan 4.5 Struktur Birokrasi PSC 119



(Sumber: Dinas Kesehatan Lombok Barat: 2023)

Berdasarkan struktur birokrasi PSC 119 LBEMS yang di tempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat terdiri dari Driver, tenaga kesehatan, dan Operator yang dimana akan di koordinir oleh koordinator PSC 119 LBEMS, namun Koordinator PSC ini berada di bawah Seksi rujukan yang di komandoi oleh kepala bidang Rujukan Kabupaten Lombok Barat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat

Tim PSC 119 LBEMS ini terdiri dari Driver, tenaga kesehatan, dan Operator yang dimana akan di koordinir oleh koordinator PSC 119 LBEMS, namun Koordinator PSC ini berada di bawah Seksi rujukan yang di komandoi oleh kepala bidang Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Maka dari itu, pentingnya sebuah birokrasi dalam suatu

organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan terhadap unit atau sub unit dalam organasasi, sehingga interaksi komunikasi berjalan secara vertikal dan sebagaimana mestinya (Aplikom, 2010).

D. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah tentang inovasi pelayanan Publik Safety Center (PSC) 119 LBEMS Dinas Kesehatan Lombok Barat yang di analisis berdasarkan teori Edward III belum berjalan secara optimal. Faktor penghambat implementasi kebijakan PSC 119 LBEMS yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan tenaga kerja dan sumber daya manusia yang terbatas sehingga efektifitas kegiatan dari Tim PSC 119 LBEMS tidak berjalan dengan lancar.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana Haedar Akib Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik, 1*(1), 1–11.
- Alim, A., Tangdilambi, N., & Badwi, A. (2019). Jurnal Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi Analitik Terhadap Pasien Rawat Jalan di RSUD Makassar). *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo, 5*(2), 165. <https://doi.org/10.29241/jmk.v5i2.164>
- Anggraeny, C. (2013). *Imovasi Pelayanan Kesehatan. 1*(1), 85–93.
- Aplikom, J. M. (2010). Peran birokrasi bagi suatu organisasi. *JURNAL*

- MEDIA APLIKOM ISSN: 2086 - 972X Vol. 1, No. 3, September 2010, 1(3), 157–165.*
- Cahyani, N. P. P. A., & Prianthara, I. B. T. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja, Keselamatan Kesehatan Kerja, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perawat RS Siloam Bali. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 8(2), 225. <https://doi.org/10.29241/jmk.v8i2.984>
- Hidayat, R., & Ferbiyanti, I. (2023). Pelayanan Publik di Kota Mataram: Program Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS). *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1), 37–44. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.3086>
- Hutapea, M. A., & Huwae, A. (2023). Resiliensi dan Kesejahteraan Psikologis Pada Dokter dan Perawat IGD RSUD Dr. Soekardjo. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 9(1), 67. <https://doi.org/10.29241/jmk.v9i1.1346>
- Lev, V., Anbarchian, T., Yao, H., Bhat, A., Britt, P., & Shieh, L. (2023). Health care-associated Clostridioides difficile infection: Learning the perspectives of health care workers to build successful strategies. *American Journal of Infection Control*, xxx, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.08.008>
- Liana, L., Jati, S. P., & Warosno, H. (2021). Analisis Kesiapan Perubahan Organisasional Di Balkesmas Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 7(2), 344–358.
- Myrskykari, H., Iirola, T., & Nordquist, H. (2023). The role of emergency medical services in the management of in-hospital emergencies: Causes and outcomes of emergency calls – A descriptive retrospective register-based study. *Australasian Emergency Care*, xxx, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.auec.2023.07.007>
- Onjewu, A. K. E., Olan, F., Nyuur, R. B. be isan, Paul, S., & Nguyen, H. T. T. (2023). The effect of government support on Bureaucracy, COVID-19 resilience and export intensity: Evidence from North Africa. *Journal of Business Research*, 156(November 2022), 113468. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113468>
- Pramestyani1, E. D., Saragi2, S., & Nurita Andayani3. (2023). Analisis Dan Pengembangan Strategi dalam Meningkatkan Daya Saing HonestDocs Sebagai Perusahaan Startup Di Era Industry 4 . 0 The Analysis and Development of Strategies in Increasing the Competitiveness of HonestDocs as A Start-Up Company in the Era of Ind. 9(2), 249–260.
- Pu, D., Cameron, P., Chapman, W., Greenstock, L., Sanci, L., Callisaya, M. L., & Haines, T. (2023). Virtual emergency care in Victoria: Stakeholder perspectives of strengths, weaknesses, and barriers and facilitators of service scale-up. *Australasian Emergency Care*, xxx, 0–1.

- <https://doi.org/10.1016/j.auec.2023.10.001>
- Revangga Putra, M., & Wardani, R. (2023). Analisis Leadership, Reinforcement dan Beban Kerja Terhadap Burnout pada Petugas Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri Analysis Of Leadership, Reinforcement and Workload on Burnout Of Health Officers In Gambiran General Hospital Kediri. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 9(2), 273–284.
- Rheni Prihanti, Bagoes Widjanarko, B. (2022). Aktor- Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Public Safety Center (Psc) 119 Di Indonesia : Literatur Review. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makasar*, XVII(8.5.2017), 2003–2005. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Rosita, R., Yudistiro, I. A., Ramadani, D. P., & Nurhain, D. (2022). Analisis Kebutuhan Jumlah Tenaga Kerja Rekam Medis di Puskesmas. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29241/jmk.v8i1.780>
- Sylvana, B. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kedaruratan Pra-Hospital Melalui Public Safety Center (Psc) 119 Untuk Peningkatan Layanan Kesehatan Di Indonesia Budi. 3(1).
- Urohmah Shifa. (2023). Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Kelas Iv C Sdn Taktakan 1. 1–7.
- Verma, S., Wilson, F., Wang, H., Smith, L., & Tak, H. J. (2023). Impact of Community Socioeconomic Characteristics on Emergency Medical Service Delays in Responding to Fatal Vehicle Crashes. *AJPM Focus*, 2(4), 100129. <https://doi.org/10.1016/j.focus.2023.100129>
- Yanuar, R. M. (2019). Inovasi pelayanan Publik (Studi Kasus: Public Safety Center (PSC) 119 kabupaten Bantul sebagai layanan kesehatan dan kegawatdaruratan). *Ilmu Pemerintahan*, 04(01), 2. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1335>
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care’S Di Kota Solok. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>